

# Babinsa Koramil 1601-05/Kota Waingapu Dampingi Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun



[Waingapu,mwartapedia.com](http://Waingapu.mwartapedia.com) – Sebanyak 146 anak usia 6 s/d 11 tahun dan masyarakat umum mendapatkan vaksinasi dosis I dan II yang dimulai pada pukul 09.00 Wita bertempat di SD Inpres Kamalaputi Waingapu, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Timur, Senin (31/01/22).

Vaksinasi massal Covid-19 Dosis I dan II untuk anak Sekolah Dasar usia 6 s/d 11 tahun yang merupakan anak-anak dari kelas 1 s/d 6 dan masyarakat umum.

Kegiatan vaksinasi massal covid-19 tersebut dilakukan oleh Puskesmas Waingapu dengan Nakes 11 orang dan 3 orang dari Nakes TNI didampingi oleh Babinsa Koramil 1601-05/Kota, Sertu K. Bara Ngeding dan Serda Deni Irawan. Adapun jenis Vaksin covid-19 yang digunakan yaitu Sinovac dan Astrazeneca kepada anak-anak dan masyarakat umum di Kota Waingapu. Bagi anak Sekolah Dasar dan masyarakat umum yang belum mendapatkan vaksinasi hari ini disampaikan untuk mendaftarkan diri untuk ditahap berikutnya.

Komandan Kodim 1601/Sumba Timur Letkol Czi Aditya Triwirawan menyampaikan kepada para Babinsa, agar selalu proaktif

menyampaikan dan menghimbau kepada warga masyarakat untuk mengajak dan segera di Vaksin dengan selalu mengikuti Protokol Kesehatan yang diterapkan sehingga terhindar dari Covid-19.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut turut hadir Kepala Sekolah SD Inpres Kamalaputi Ibu Dorkas Kondanamu, S. Pd., Petugas Vaksin (Vaksinator) serta anak Sekolah Dasar penerima vaksin dan masyarakat umum.

(Penrem/MI)

---

## **Babinsa Koramil 1601-05/Kota Waingapu Dampingi Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun**



[Waingapu,mwartapedia.com](http://Waingapu.mwartapedia.com) – Sebanyak 146 anak usia 6 s/d 11 tahun dan masyarakat umum mendapatkan vaksinasi dosis I dan II yang dimulai pada pukul 09.00 Wita bertempat di SD Inpres Kamalaputi Waingapu, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Timur, Senin (31/01/22).

Vaksinasi massal Covid-19 Dosis I dan II untuk anak Sekolah Dasar usia 6 s/d 11 tahun yang merupakan anak-anak dari kelas

1 s/d 6 dan masyarakat umum.

Kegiatan vaksinasi massal covid-19 tersebut dilakukan oleh Puskesmas Waingapu dengan Nakes 11 orang dan 3 orang dari Nakes TNI didampingi oleh Babinsa Koramil 1601-05/Kota, Sertu K. Bara Ngeding dan Serda Deni Irawan. Adapun jenis Vaksin covid-19 yang digunakan yaitu Sinovac dan Astrazeneca kepada anak-anak dan masyarakat umum di Kota Waingapu. Bagi anak Sekolah Dasar dan masyarakat umum yang belum mendapatkan vaksinasi hari ini disampaikan untuk mendaftarkan diri untuk ditahap berikutnya.

Komandan Kodim 1601/Sumba Timur Letkol Czi Aditya Triwirawan menyampaikan kepada para Babinsa, agar selalu proaktif menyampaikan dan menghimbau kepada warga masyarakat untuk mengajak dan segera di Vaksin dengan selalu mengikuti Protokol Kesehatan yang diterapkan sehingga terhindar dari Covid-19.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut turut hadir Kepala Sekolah SD Inpres Kamalaputi Ibu Dorkas Kondanamu, S. Pd., Petugas Vaksin (Vaksinasi) serta anak Sekolah Dasar penerima vaksin dan masyarakat umum.

(Penrem/MI)

---

**Pimpinan Daerah dari 12  
Kabupaten di NTT Bertemu  
Waket DPR RI, Bahas Program**

# Strategis



**Jakarta, [mwartapedia.com](http://mwartapedia.com)** – Sebanyak 12 Pimpinan daerah dari 12 Kabupaten di NTT bertemu Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. 12 pimpinan baik eksekutif dan unsur legislatif ini adalah Bupati Sumba Tengah, Bupati Alor, Wakil Bupati Ende, Bupati Sabu Raijua, Bupati Belu, Bupati Nagekeo, Wakil Bupati Sikka, Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Wakil Bupati Manggarai Timur, Bupati Kupang, Bupati Manggarai Barat, Bupati Rote serta Wakil Ketua DPRD Sumba Timur serta Anggota DPRD NTT dari Fraksi Nasdem.

Rencana pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Wilayah partai Nasdem yang berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada akhir tahun 2021 lalu. 12 pimpinan daerah ini diboyong ke Jakarta oleh Julie Sutrisno Laiskodat yang juga istri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Pertemuan itu dimaksudkan untuk mengkonsolidasi sejumlah permasalahan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Pertemuan bersama Rahmat Gobel yang merupakan politisi Nasdem ini berlangsung di ruang Wakil Ketua DPR RI, Gedung Senayan, Rabu, 02/02/22.

Turut hadir pada kesempatan itu Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dapil NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, Jacky Uly dan Ratu Wulla.

Pada kesempatan itu Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do dihadapan Rachmat Gobel menyampaikan persoalan kelangkaan pupuk subsidi yang dialami oleh para petani. pupuk subsidi merupakan usulan daerah dan pemerintah hanya bisa memenuhi 9 persen dari seluruh kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh para petani.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menganggarkan sebanyak 30 trilyun untuk pupuk subsidi tapi belum mampu menjawab kebutuhan para petani terkait pupuk subsidi di daerah.

Dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tidak mencukupi semua kebutuhan pupuk para petani. dari sisi lain juga muncul para spekulan atau distributor nakal yang menjual kembali pupuk subsidi.

Bupati Sumba Tengah, Paulus Kira meyampaikan progres program Food Estate yang sementara berjalan di Kabupaten Sumba Tengah. Food Estate ini mendapat perhatian Pemerintah Pusat yang dibuktikan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Lokasi Food Estate pada beberapa waktu yang lalu di Sumba Tengah.

Bupati Paulus mengeluhkan jalan usaha tani sepanjang 50 KM yang belum dikerjakan. jalan usaha tani itu kata dia merupakan akses ke lahan food estate. ia berharap pemerintah pusat agar memperhatikan keberadaan jalan usaha tani tersebut agar mendukung aksesibilitas serta memudahkan dalam pengangkutan hasil.

Pada kesempatan itu juga ia meminta dukungan pengadaan Alsintan berupa traktor untuk mendukung program food estate. ia juga meminta penegasan dari pemerintah terkait pengembangan lahan food estate, harus ada keputusan pemerintah terkait pengembangan food estate. seperti di Sumba Tengah itu belum ada perluasan sehingga ada peraturan pemerintah yang mengatur

tentang food estate.

Bupati Manggarai Barat meminta pembangunan jalan Nasional ke Golimori. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR kata dia telah mengalokasikan 531 Miliar untuk pembangunan ke jalan itu. di lokasi itu ada 361 KK yang belum mendapat persetujuan untuk mendapat ganti rugi.

Sementara itu beberapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir juga menyampaikan berbagai macam problem yang dihadapi terkait anggaran yang minim akibat pandemi Covid-19. Ada sejumlah persoalan yang disampaikan mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, embung hingga program pertanian dan kebutuhan Alsintan serta Elektrifikasi dan pembangunan pasar rakyat.

Pada kesempatan itu juga ada diskusi yang menarik terkait produksi garam dan kebutuhan garam nasional yang masih import. Padahal lahan-lahan potensial untuk produksi garam , NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi dan berpeluang mendukung kebutuhan garam nasional.

Tantangan lainnya adalah harga jual di setiap daerah di NTT sangat bervariasi. jika dikirim ke luar NTT membutuhkan biaya mobilisasi yang sangat mahal.

Pada kesempatan itu Rachmat Gobel juga memberikan tantangan apakah NTT bisa mensupport kebutuhan garam nasional? kalau NTT bisa mensupport, bisa dibicarakan karena presiden lagi menggenjot TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Kalau bisa produksi sendiri mengapa harus import apalagi cuaca dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam.

Pada tahun 2021 Pemerintah memutuskan untuk membuka keran sebesar 3,07 juta ton. Impor terpaksa dilakukan pemerintah karena kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton pada 2021. Sementara stok dari petani garam lokal jauh dari mencukupi.

" Kalau NTT bisa penuhi kebutuhan garam nasional artinya kenapa harus dari luar?," Kata Rachmat Gobel.

Dia menjelaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Sebagai contoh ia menyebutkan garam dari NTT memiliki kualitas yang premium, dan mendekati kualitas garam industri. Namun dalam kenyataan harganya sering tak sebanding dengan kualitasnya.

"Jadi perlu strategi marketing. Perlu narasi tentang garam NTT. Selain itu, harus bersatu agar tidak ada banting-bantingan harga. Indonesia sangat membutuhkan garam dan ke depan kebutuhannya akan terus meningkat. Saat ini Indonesia masih mengimpor garam industri," katanya. Hal ini merupakan potensi ekonomi itu sendiri bagi NTT. "Butuh sentuhan lebih lanjut agar ekonomi garam di NTT menjadi kuat," katanya.

Menurut Gobel, masih banyak potensi yang dimiliki NTT, seperti kain tenun, beras Sumba, pariwisata, dan lain-lain. Mereka membutuhkan alat-alat berat untuk membuat jalan perintis, memperluas lahan pertanian, membangun embung, dan lain-lain. Mereka juga menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, apalagi dokter spesialis.

Terkait semua aspirasi yang disampaikan oleh 12 pimpinan daerah dari NTT, Gobel berjanji akan meneruskan ke Kementerian terkait. Sebagai wakil rakyat dari Indonesia Timur, Gobel mengaku memiliki perasaan yang sama dengan masyarakat NTT.

"Saya akan teruskan ke kementerian terkait, karena ini sangat penting bukan hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT, tapi juga bagi Indonesia," ujarnya.

Menurutnya Indonesia Timur harus mendapat perhatian yang lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal dari Indonesia Timur.

Terkait pupuk subsidi, anggota Komisi IV DPD RI, Julie Sutrisno Laiskodat mendorong untuk petani tidak harus selalu



menunggu untuk mendapatkan pupuk subsidi.

“Saya berharap agar kita tidak terus bergantung pada pupuk subsidi, karena untuk diketahui kandungan yang terkandung dalam pupuk subsidi jauh lebih rendah dibanding pupuk non subsidi, sehingga jumlah pupuk subsidi pasti akan lebih banyak jumlah yang ditabur dibandingkan dengan pupuk non subsidi,” kata Julie yang juga ketua Dekranasda NTT ini.

Dia menjelaskan kalau dihitung biayanya akan sama antara pupuk subsidi dan pupuk non subsidi dalam setiap hektar sawah.

“Oleh karena itu, kami akan terus memperjuangkan dan mendorong pemerintah untuk lebih banyak membantu petani melalui program UPP0 (Unit Pengolahan Pupuk Organik) sehingga petani dapat mandiri dalam membuat pupuk,” jelas ketua Teritori Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, NTT DPP Partai Nasdem ini. (\*\*\*/MI)

---

## **Pimpinan Daerah dari 12 Kabupaten di NTT Bertemu Waket DPR RI, Bahas Program Strategis**





**Jakarta, mwartapedia.com** – Sebanyak 12 Pimpinan daerah dari 12 Kabupaten di NTT bertemu Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. 12 pimpinan baik eksekutif dan unsur legislatif ini adalah Bupati Sumba Tengah, Bupati Alor, Wakil Bupati Ende, Bupati Sabu Raijua, Bupati Belu, Bupati Nagekeo, Wakil Bupati Sikka, Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Wakil Bupati Manggarai Timur, Bupati Kupang, Bupati Manggarai Barat, Bupati Rote serta Wakil Ketua DPRD Sumba Timur serta Anggota DPRD NTT dari Fraksi Nasdem.

Rencana pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Wilayah partai Nasdem yang berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada akhir tahun 2021 lalu. 12 pimpinan daerah ini diboyong ke Jakarta oleh Julie Sutrisno Laiskodat yang juga istri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Pertemuan itu dimaksudkan untuk mengkonsolidasi sejumlah permasalahan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Pertemuan bersama Rahmat Gobel yang merupakan politisi Nasdem ini berlangsung di ruang Wakil Ketua DPR RI, Gedung Senayan, Rabu, 02/02/22.

Turut hadir pada kesempatan itu Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dapil NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, Jacky Uly dan Ratu Wulla.

Pada kesempatan itu Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do dihadapan Rachmat Gobel menyampaikan persoalan kelangkaan

pupuk subsidi yang dialami oleh para petani. pupuk subsidi merupakan usulan daerah dan pemerintah hanya bisa memenuhi 9 persen dari seluruh kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh para petani.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan sebanyak 30 triliun untuk pupuk subsidi tapi belum mampu menjawab kebutuhan para petani terkait pupuk subsidi di daerah.

Dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tidak mencukupi semua kebutuhan pupuk para petani. dari sisi lain juga muncul para spekulasi atau distributor nakal yang menjual kembali pupuk subsidi.

Bupati Sumba Tengah, Paulus Kira menyampaikan progres program Food Estate yang sementara berjalan di Kabupaten Sumba Tengah. Food Estate ini mendapat perhatian Pemerintah Pusat yang dibuktikan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Lokasi Food Estate pada beberapa waktu yang lalu di Sumba Tengah.

Bupati Paulus mengeluhkan jalan usaha tani sepanjang 50 KM yang belum dikerjakan. jalan usaha tani itu kata dia merupakan akses ke lahan food estate. ia berharap pemerintah pusat agar memperhatikan keberadaan jalan usaha tani tersebut agar mendukung aksesibilitas serta memudahkan dalam pengangkutan hasil.

Pada kesempatan itu juga ia meminta dukungan pengadaan Alsintan berupa traktor untuk mendukung program food estate. ia juga meminta penegasan dari pemerintah terkait pengembangan lahan food estate, harus ada keputusan pemerintah terkait pengembangan food estate. seperti di Sumba Tengah itu belum ada perluasan sehingga ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang food estate.

Bupati Manggarai Barat meminta pembangunan jalan Nasional ke Golimori. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR kata dia telah mengalokasikan 531 Miliar untuk pembangunan ke jalan

itu. di lokasi itu ada 361 KK yang belum mendapat persetujuan untuk mendapat ganti rugi.

Sementara itu beberapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir juga menyampaikan berbagai macam problem yang dihadapi terkait anggaran yang minim akibat pandemi Covid-19. Ada sejumlah persoalan yang disampaikan mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, embung hingga program pertanian dan kebutuhan Alsintan serta Elektrifikasi dan pembangunan pasar rakyat.

Pada kesempatan itu juga ada diskusi yang menarik terkait produksi garam dan kebutuhan garam nasional yang masih import. Padahal lahan-lahan potensial untuk produksi garam , NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi dan berpeluang mendukung kebutuhan garam nasional.

Tantangan lainnya adalah harga jual di setiap daerah di NTT sangat bervariasi. jika dikirim ke luar NTT membutuhkan biaya mobilisasi yang sangat mahal.

Pada kesempatan itu Rachmat Gobel juga memberikan tantangan apakah NTT bisa mensupport kebutuhan garam nasional? kalau NTT bisa mensupport, bisa dibicarakan karena presiden lagi menggenjot TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Kalau bisa produksi sendiri mengapa harus import apalagi cuaca dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam.

Pada tahun 2021 Pemerintah memutuskan untuk membuka keran sebesar 3,07 juta ton. Impor terpaksa dilakukan pemerintah karena kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton pada 2021. Sementara stok dari petani garam lokal jauh dari mencukupi.

" Kalau NTT bisa penuhi kebutuhan garam nasional artinya kenapa harus dari luar?," Kata Rachmat Gobel.

Dia menjelaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Sebagai

contoh ia menyebutkan garam dari NTT memiliki kualitas yang premium, dan mendekati kualitas garam industri. Namun dalam kenyataan harganya sering tak sebanding dengan kualitasnya.

“Jadi perlu strategi marketing. Perlu narasi tentang garam NTT. Selain itu, harus bersatu agar tidak ada banting-bantingan harga. Indonesia sangat membutuhkan garam dan ke depan kebutuhannya akan terus meningkat. Saat ini Indonesia masih mengimpor garam industri,” katanya. Hal ini merupakan potensi ekonomi itu sendiri bagi NTT. “Butuh sentuhan lebih lanjut agar ekonomi garam di NTT menjadi kuat,” katanya.

Menurut Gobel, masih banyak potensi yang dimiliki NTT, seperti kain tenun, beras Sumba, pariwisata, dan lain-lain. Mereka membutuhkan alat-alat berat untuk membuat jalan perintis, memperluas lahan pertanian, membangun embung, dan lain-lain. Mereka juga menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, apalagi dokter spesialis.

Terkait semua aspirasi yang disampaikan oleh 12 pimpinan daerah dari NTT, Gobel berjanji akan meneruskan ke Kementerian terkait. Sebagai wakil rakyat dari Indonesia Timur, Gobel mengaku memiliki perasaan yang sama dengan masyarakat NTT.

“Saya akan teruskan ke kementerian terkait, karena ini sangat penting bukan hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT, tapi juga bagi Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya Indonesia Timur harus mendapat perhatian yang lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal dari Indonesia Timur.

Terkait pupuk subsidi, anggota Komisi IV DPD RI, Julie Sutrisno Laiskodat mendorong untuk petani tidak harus selalu menunggu untuk mendapatkan pupuk subsidi.

“Saya berharap agar kita tidak terus bergantung pada pupuk subsidi, karena untuk diketahui kandungan yang terkandung dalam pupuk subsidi jauh lebih rendah dibanding pupuk non

subsidi, sehingga jumlah pupuk subsidi pasti akan lebih banyak jumlah yang ditabur dibandingkan dengan pupuk non subsidi,” kata Julie yang juga ketua Dekranasda NTT ini.

Dia menjelaskan kalau dihitung biayanya akan sama antara pupuk subsidi dan pupuk non subsidi dalam setiap hektar sawah.

“Oleh karena itu, kami akan terus memperjuangkan dan mendorong pemerintah untuk lebih banyak membantu petani melalui program UPP0 (Unit Pengolahan Pupuk Organik) sehingga petani dapat mandiri dalam membuat pupuk,” jelas ketua Teritori Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, NTT DPP Partai Nasdem ini. (\*\*\*/MI)

---

## Pimpinan Daerah dari 12 Kabupaten di NTT Bertemu Wakil Ketua DPR RI, Bahas Program Strategis



**Jakarta, [mwartapedia.com](https://www.mwartapedia.com)** – Sebanyak 12 Pimpinan daerah dari 12 Kabupaten di NTT bertemu Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel.

12 pimpinan baik eksekutif dan unsur legislatif ini adalah Bupati Sumba Tengah, Bupati Alor, Wakil Bupati Ende, Bupati Sabu Raijua, Bupati Belu, Bupati Nagekeo, Wakil Bupati Sikka, Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Wakil Bupati Manggarai Timur, Bupati Kupang, Bupati Manggarai Barat, Bupati Rote serta Wakil Ketua DPRD Sumba Timur serta Anggota DPRD NTT dari Fraksi Nasdem.

Rencana pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Wilayah partai Nasdem yang berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada akhir tahun 2021 lalu. 12 pimpinan daerah ini diboyong ke Jakarta oleh Julie Sutrisno Laiskodat yang juga istri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Pertemuan itu dimaksudkan untuk mengkonsolidasi sejumlah permasalahan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Pertemuan bersama Rahmat Gobel yang merupakan politisi Nasdem ini berlangsung di ruang Wakil Ketua DPR RI, Gedung Senayan, Rabu, 02/02/22.

Turut hadir pada kesempatan itu Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dapil NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, Jacky Uly dan Ratu Wulla.

Pada kesempatan itu Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do dihadapan Rachmat Gobel menyampaikan persoalan kelangkaan pupuk subsidi yang dialami oleh para petani. pupuk subsidi merupakan usulan daerah dan pemerintah hanya bisa memenuhi 9 persen dari seluruh kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh para petani.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menganggarkan sebanyak 30 trilyun untuk pupuk subsidi tapi belum mampu menjawab kebutuhan para petani terkait pupuk subsidi di daerah.

Dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tidak mencukupi semua kebutuhan pupuk para petani. dari sisi lain

juga muncul para spekulasi atau distributor nakal yang menjual kembali pupuk subsidi.

Bupati Sumba Tengah, Paulus Kira menyampaikan progres program Food Estate yang sementara berjalan di Kabupaten Sumba Tengah. Food Estate ini mendapat perhatian Pemerintah Pusat yang dibuktikan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Lokasi Food Estate pada beberapa waktu yang lalu di Sumba Tengah.

Bupati Paulus mengeluhkan jalan usaha tani sepanjang 50 KM yang belum dikerjakan. jalan usaha tani itu kata dia merupakan akses ke lahan food estate. ia berharap pemerintah pusat agar memperhatikan keberadaan jalan usaha tani tersebut agar mendukung aksesibilitas serta memudahkan dalam pengangkutan hasil.

Pada kesempatan itu juga ia meminta dukungan pengadaan Alsintan berupa traktor untuk mendukung program food estate. ia juga meminta penegasan dari pemerintah terkait pengembangan lahan food estate, harus ada keputusan pemerintah terkait pengembangan food estate. seperti di Sumba Tengah itu belum ada perluasan sehingga ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang food estate.

Bupati Manggarai Barat meminta pembangunan jalan Nasional ke Golimori. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR kata dia telah menganggarkan 531 Miliar untuk pembangunan ke jalan itu. di lokasi itu ada 361 KK yang belum mendapat persetujuan untuk mendapat ganti rugi.

Sementara itu beberapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir juga menyampaikan berbagai macam problem yang dihadapi terkait anggaran yang minim akibat pandemi Covid-19. Ada sejumlah persoalan yang disampaikan mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, embung hingga program pertanian dan kebutuhan Alsintan serta Elektrifikasi dan pembangunan pasar rakyat.

Pada kesempatan itu juga ada diskusi yang menarik terkait



produksi garam dan kebutuhan garam nasional yang masih import. Padahal lahan-lahan potensial untuk produksi garam , NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi dan berpeluang mendukung kebutuhan garam nasional.

Tantangan lainnya adalah harga jual di setiap daerah di NTT sangat bervariasi. jika dikirim ke luar NTT membutuhkan biaya mobilisasi yang sangat mahal.

Pada kesempatan itu Rachmat Gobel juga memberikan tantangan apakah NTT bisa mensupport kebutuhan garam nasional? kalau NTT bisa mensupport, bisa dibicarakan karena presiden lagi menggenjot TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Kalau bisa produksi sendiri mengapa harus import apalagi cuaca dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam.

Pada tahun 2021 Pemerintah memutuskan untuk membuka keran sebesar 3,07 juta ton. Impor terpaksa dilakukan pemerintah karena kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton pada 2021. Sementara stok dari petani garam lokal jauh dari mencukupi.

" Kalau NTT bisa penuhi kebutuhan garam nasional artinya kenapa harus dari luar?," Kata Rachmat Gobel.

Dia menjelaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Sebagai contoh ia menyebutkan garam dari NTT memiliki kualitas yang premium, dan mendekati kualitas garam industri. Namun dalam kenyataan harganya sering tak sebanding dengan kualitasnya.

"Jadi perlu strategi marketing. Perlu narasi tentang garam NTT. Selain itu, harus bersatu agar tidak ada banting-bantingan harga. Indonesia sangat membutuhkan garam dan ke depan kebutuhannya akan terus meningkat. Saat ini Indonesia masih mengimpor garam industri," katanya. Hal ini merupakan potensi ekonomi itu sendiri bagi NTT. "Butuh sentuhan lebih lanjut agar ekonomi garam di NTT menjadi kuat," katanya.

Menurut Gobel, masih banyak potensi yang dimiliki NTT, seperti kain tenun, beras Sumba, pariwisata, dan lain-lain. Mereka membutuhkan alat-alat berat untuk membuat jalan perintis, memperluas lahan pertanian, membangun embung, dan lain-lain. Mereka juga menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, apalagi dokter spesialis.

Terkait semua aspirasi yang disampaikan oleh 12 pimpinan daerah dari NTT, Gobel berjanji akan meneruskan ke Kementerian terkait. Sebagai wakil rakyat dari Indonesia Timur, Gobel mengaku memiliki perasaan yang sama dengan masyarakat NTT.

“Saya akan teruskan ke kementerian terkait, karena ini sangat penting bukan hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT, tapi juga bagi Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya Indonesia Timur harus mendapat perhatian yang lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal dari Indonesia Timur.

Terkait pupuk subsidi, anggota Komisi IV DPD RI, Julie Sutrisno Laiskodat mendorong untuk petani tidak harus selalu menunggu untuk mendapatkan pupuk subsidi.

“Saya berharap agar kita tidak terus bergantung pada pupuk subsidi, karena untuk diketahui kandungan yang terkandung dalam pupuk subsidi jauh lebih rendah dibanding pupuk non subsidi, sehingga jumlah pupuk subsidi pasti akan lebih banyak jumlah yang ditabur dibanding dengan pupuk non subsidi,” kata Julie yang juga ketua Dekranasda NTT ini.

Dia menjelaskan kalau dihitung biayanya akan sama antara pupuk subsidi dan pupuk non subsidi dalam setiap hektar sawah.

“Oleh karena itu, kami akan terus memperjuangkan dan mendorong pemerintah untuk lebih banyak membantu petani melalui program UPP0 (Unit Pengolahan Pupuk Organik) sehingga petani dapat mandiri dalam membuat pupuk,” jelas ketua Teritori Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, NTT DPP Partai Nasdem ini. (\*\*\*/MI)